

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan iklim dalam banyak hal mempunyai dampak buruk bagi lingkungan dan manusia, salah satu yang paling berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan adalah aktivitas korporasi yang banyak menghasilkan limbah dan polusi, Maka sudah seharusnya bagi korporasi – korporasi yang ada di Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) mengatur tentang perseroan terbatas soal tanggung jawab sosial dan Lingkungan, dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Korporasi juga harus mulai melaksanakan aktifitas bisnis yang berkelanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi juga dipertanggung jawabkan lewat laporan keberlanjutan perusahaan, pelaporan keberlanjutan adalah hal yang penting alat komunikasi untuk menunjukkan transparansi dan tata kelola yang efektif dan khusus ditujukan kepada pemangku kepentingan (Sethi et al., 2017). Konsep pelaporan keberlanjutan adalah tentang pertemuan kebutuhan informasi keberlanjutan pemangku kepentingan terkait dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (EES) dari operasi bisnis perusahaan (Mion dan Aduai, 2020).

Dalam upaya mendukung transparansi pelaporan keberlanjutan, pemerintah Indonesia turut menegaskan pentingnya keuangan berkelanjutan dan meminta lembaga keuangan untuk menerapkan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam bisnis mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi No. 51/POJK.03/2017 mengenai seluruh lembaga Jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib melaksanakan keuangan keberlanjutan atau keberlangsungan ekonomi. Dari aturan yang diterbitkan OJK sangat jelas bahwa sangat penting bagi persusahaan untuk melaporkan laporan keberlanjutan.

Kasus PT Pertamina pada tahun 2019 menjadi salah satu contoh terbaru tentang kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh korporasi. Fenomena ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2017 di pesisir pantai Karawang, Jawa barat. Terjadi kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 aera Pertamina Hulu Energi *Offshore Northwest Java*, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan

Menurut lembaga pemerintah Pusat Riset Kelautan (Pusrikel) Sektor ekonomi pertama kali terkena dampak polusi. Masalah lingkungan yang ditimbulkan diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Bau menyengat, mirip campuran minyak tanah dan minyak, menyebar di sekitar dermaga di Pulau Vidadari di Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Tim koil baru turun dari speedboat Rabu (31/7) lalu dan tiba-tiba tercium bau menyengat. Di pantai, dapat terlihat segumpal pasir bercampur minyak mentah yang sangat merusak lingkungan.

**Tabel 1. 1 Laporan ACGA 2020**

| No. | Negara    | Total (%) |
|-----|-----------|-----------|
| 1   | Singapura | 63,2      |
| 2   | Malaysia  | 59,5      |
| 3   | Thailand  | 56,6      |
| 4   | Filipina  | 39,0      |
| 5   | Indonesia | 33,6      |

Sumber: ACGA Special Report 2020

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA, 2020), negara dengan nilai corporate governance tertinggi di ASEAN emerging market adalah Malaysia dengan skor 59,5 dan terendah adalah Indonesia dengan nilai 33,6% setelah Filipina. Metrotvnews Report (2020) Menurut Angela Indirawati Simatupang, pakar tata kelola perusahaan Indonesia, penyebabnya adalah emiten di Indonesia belum memiliki tingkat kesadaran yang sama tentang pentingnya tata kelola, ada yang kesadarannya sangat tinggi dan ada yang rendah, cukup bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara koneksi politik, kepemilikan pemerintah, profitabilitas, dan leverage terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Olayinka et al., 2021) dengan pengukuran variabel dependen kualitas laporan keberlanjutan dengan metode penilain. Lalu diikuti dengan modifikasi pada variabel independen yaitu koneksi politik, kepemilikan pemerintah, profitabilitas, dan *leverage*.

Menurut (Purwoto, 2011) Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mengusahakan memiliki ikatan potilik dan

kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Menurut (Moses et al., 2020) dimana dalam penelitiannya mengungkapkan adanya hubungan positif antara *political connection* dan *sustainability reporting quality*. Dalam penelitian (Muliawati & Hariyati, 2021) menjelaskan bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *sustainability reporting quality*. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Tangke & Habbe, 2017) dimana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *sustainability reporting quality*. Namun, dalam penelitian (Maiza Abd Rahman & Nor Izah Ku Ismail, 2016) mengungkapkan bahwa tidak adanya hubungan (Anita & Suryani, 2021) antara *political connection* dan *sustainability reporting quality*. Penelitian (Anita & Suryani, 2021) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *sustainability reporting quality*. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu hipotesis penelitian ini

Menurut Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 perusahaan BUMN adalah perusahaan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian menurut teori agensi menunjukkan bahwa negara sebagai pemegang saham pengendali dapat mempengaruhi kepentingan pemegang saham minoritas non-negara (Shi et al., 2020). Menurut (Eryadi et al., 2021) dimana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *state ownership* berpengaruh positif terhadap *sustainability report quality*. Penelitian ini juga didukung oleh (Gunawan & Meiranto, 2020) dimana dalam penelitiannya mengungkapkan hal yang sama dimana *State ownership* berpengaruh positif terhadap *sustainability report quality*. Penelitian ini

juga sejalan dengan (Rudyanto, 2017) dimana dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan positif yang terjadi antara *state ownership* dan *sustainability report quality*. (Ikmal et al., 2015) mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kepemilikan saham pemerintah terhadap CSR dalam *sustainability report*.

Berdasarkan teori *legitimacy* mengemukakan perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih tinggi mengungkapkan lebih banyak informasi tanggung jawab sosial yang menggambarkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan *sustainability report*. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh (Freeman & McVea, 1984). Penelitian (Liana, 2019) dan (Chandradinangga & Rita, 2020) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa terdapat temuan hubungan positif antara profitabilitas dan *sustainability report*. Penelitian (Kumar et al., 2021) mengungkapkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif terhadap *sustainability report quality*.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh (Freeman & McVea, 1984) perusahaan yang memiliki kewajiban yang tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengungkapkan informasi *sustainability report*.

Perbedaan penelitian ini dari yang terdahulu adalah di pemakaian objek penelitian itu sendiri, penelitian ini menggunakan objek dari perusahaan BUMN Indonesia yang tercatat di bursa efek. Berdasarkan latar belakang saya maka judul penelitian saya adalah “Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah, *Profitability*, dan *Leverage* Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan pada BUMN Indonesia.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Di berbagai belahan dunia sudah menjadi hal yang lazim bagi korporasi melaporkan laporan keberlanjutan. Mengingat urgensi tentang perubahan iklim maka menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama tak terkecuali bagi korporasi. Para investor dan pemangku kepentingan harus mulai meningkatkan transparansi kualitas laporan keberlanjutan. Pada penelitian ini juga menambahkan faktor lain yaitu koneksi politik, kepemilikan pemerintah, dan rangkap jabatan direksi pada BUMN Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Menurut survei yang dilakukan oleh ACGA dikatakan bahwa Indonesia berada di peringkat terbawah dengan nilai sebesar 33,6%
2. Masih adanya kasus – kasus pencemaran yang diakibatkan oleh BUMN Indonesia

## 1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki maksud untuk menjawab beberapa pertanyaan yang timbul pada objek penelitian. Pertanyaan tersebut adalah:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.
2. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.
4. Apakah leverage berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah pada uraian diatas, maka menghasilkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Untuk akademisi, diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan khususnya dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan laporan keberlanjutan perusahaan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi.

## 2. Manfaat Praktisi

Untuk manajemen perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat membantu manajemen dalam melihat pentingnya corporate governance yang baik sebagai upaya meningkatkan *Sustainability Reporting Quality* perusahaan. Untuk investor, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pentingnya pengungkapan *corporate governance* dan kualitas dari *sustainability reporting* dari suatu perusahaan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada regulator selaku lembaga pengawas sekaligus pemuat kebijakan suatu negara agar lebih memperhatikan pengungkapan laporan non keuangan pada suatu perusahaan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.



## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II akan diuraikan mengenai teori-teori serta pengertian dasar yang digunakan penulis dalam pemecahan masalah. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan pada pokok pembahasan, literatur pada penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

## **3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab III terdiri dari metodologi yang digunakan dalam penelitian antara lain objek penelitian, kerangka penelitian, metode analisis data, penjelasan populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data.

## **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis statistik deskriptif, hasil pengujian, dan hasil dari pengujian untuk membuktikan hipotesis.

## **5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab V, akan dibahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian, jawaban atas rumusan masalah, kontribusi penelitian, dan keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.